

FENOMENA KEBAHASAAN PADA LEMBAGA PEMERINTAH DI KOTA SAMARINDA 2023 (ANALISIS KUANTITATIF)

LANGUAGE PHENOMENA IN SAMARINDA'S GOVERNMENT INSTITUTIONS IN 2023 (QUANTITATIVE ANALYSIS)

Abd. Rahman¹, M. Bahri Arifin², Abdul Basir³

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur¹, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Mulawarman², Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Mulawarman³
Pos-el: abd.rahman_y@yahoo.com¹

*)Naskah diterima: 18 Januari 2024; direvisi: 13 Februari 2024; disetujui: 27 Maret 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena kebahasaan lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Fenomena tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahasa di ruang publik lembaga. Variabel penelitian ini terdiri atas tiga aspek, yaitu pengetahuan regulasi kebahasaan, sikap bahasa, dan penggunaan bahasa di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *ex-post facto*, yaitu meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak diberi perlakuan khusus oleh peneliti. Sampel penelitian berjumlah 22 lembaga pemerintah di Kota Samarinda, yaitu instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan sekolah negeri tingkat pertama dan menengah. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner pengetahuan regulasi kebahasaan, sikap bahasa, dan penggunaan bahasa di ruang publik lembaga. Metode statistik dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kebahasaan pada lembaga pemerintah di Kota Samarinda terdapat pengaruh positif antara pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa di ruang publik.

Kata-kata kunci: fenomena, sikap bahasa, penggunaan bahasa, ruang publik

Abstract

The purpose of this study is to identify the linguistic phenomenon of Samarinda's government institutions. This issue is manifested in the usage of language in institutional public spaces. This research variable consists of three components: awareness of linguistic regulations, language attitudes, and language use in public areas. This study employs a quantitative approach with an ex-post facto strategy, specifically evaluating cause-and-effect relationships that are not given special consideration by researchers.

The research sample comprised of 22 government institutions in Samarinda, including East Kalimantan Provincial government institutions, Samarinda government institutions, and elementary and secondary state schools. The sample was determined using the purposive sampling method. Questionnaires were used to collect research data on linguistic regulations, language attitudes, and language use in institutional public areas. The statistical strategy used

in this study is Multiple Linear Regression Analysis. The findings of this study indicate that linguistic phenomena in government institutions in Samarinda have a favorable influence on awareness of linguistic regulations and language attitudes about language use in public areas.

Keywords: phenomena, language attitude, language use, public space

PENDAHULUAN

Fakta penggunaan bahasa yang adadi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Samarinda, terlihat penggunaan bahasanya tidak tertib secara regulasi. Sebagai contoh, beberapa pusat perbelanjaan di Kota Samarinda dinamai *Samarinda Square*, *Big Mall*, dan *Samarinda Central Plaza*; beberapa restoran atau tempat makan dinamai *Alaya Food Festival*, *Lipan Hill Restaurant and Cafe*; dan *Hary Crab Pahlawan*, serta beberapa perumahan/apartemen dinamai *Citra Gran Senyur City*, *Sempaja Residence*, dan *New Mahakam Grande*. Di ruang publik seperti di mal, pusat perbelanjaan, dan hotel, lebih dominan kata *in* dan *out*, daripada kata *masuk* dan *keluar*, istilah *meeting room* daripada *ruang pertemuan*. Di berbagai tempat ruang publik lainnya, termasuk lembaga pendidikan, masih ada yang menggunakan kata *welcome* daripada *selamat datang*. Bahkan, di lembaga pemerintah pun, kita masih sering menemukan kata *men* dan *women* daripada *pria* dan *wanita* yang terpampang di sekitar kamar kecil atau toilet.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan dan penyimpangan penggunaan bahasa cukup menggejala dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan. Kesalahan itu meliputi kosakata, struktur, logika bahasa, dan punctuation atau ejaan, serta ketidaktaatan terhadap regulasi kebahasaan. Kondisi ini pada akhirnya akan menumbuhkan sikap kurang positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia.

Namun, bukan berarti setiap saat seseorang harus berbahasa Indonesia baku karena fakta kebahasaan di negara kita ada tiga, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiganya harus ditempatkan sesuai dengan ranahnya masing-masing, seperti yang tercermin pada Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

Penelitian fenomena kebahasaan sudah ada sebelumnya, meski ada perbedaan dengan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Di antara penelitian tersebut adalah *Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Kebahasaan terhadap Sikap Bahasa Pengusaha Kuliner di Kabupaten Pringsewu* oleh Ratih Rahayu dan Sustiyantini (*Jurnal Ranah* 6 [1]). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengusaha kuliner di Kabupaten Pringsewu mengenai peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan kurang karena hampir semua responden tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang ditanyakan. Sikap bahasa pengusaha kuliner di Kabupaten Pringsewu dapat dikategorikan baik karena nilai rata-ratanya sudah mencapai 84,36%. Adapun pengaruh pengetahuan mengenai peraturan kebahasaan terhadap sikap bahasa pengusaha kuliner di Kabupaten Pringsewu tidak signifikan karena hanya sebesar 1%. Selain itu, M. Andri Zulfadli, S.Pd. melakukan penelitian *Penggunaan Bahasa pada Media Luar Ruang di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

ditemukan banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang atau ruang publik.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda terhadap penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen yang mereka pimpin. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, OPD Kota Samarinda, serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN/ sederajat) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN/ sederajat). Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjawab asumsi-asumsi yang telah dipaparkan di atas.

Setelah mencermati pemaparan pada latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah fenomena kebahasaan pada lembaga pemerintah di Kota Samarinda terdapat pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa pimpinan lembaga terhadap penggunaan bahasanya di ruang publik? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda terhadap penggunaan bahasanya di ruang publik.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (1) secara teoretis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya; (2) manfaat praktis: untuk mengetahui tingkat kesesuaian regulasi kebahasaan dengan penggunaan bahasa di ruang publik bagi

lembaga pemerintah di Kota Samarinda, sebagai rujukan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerapan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan regulasi kebahasaan lainnya.

LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dipaparkan landasan teori yang mendukung penelitian ini.

1. Pengetahuan Regulasi Kebahasaan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan yang terjadi begitu orang menyadari objek tertentu. Pengetahuan didefinisikan oleh Yuniarsih dan Suwatno (2008:23) sebagai informasi yang dimiliki seseorang, khususnya dalam bidang tertentu. Ada enam tahap pengetahuan yang termasuk dalam domain kognitif: mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan atau proses kognitif sangat berperan dalam menentukan perilaku seseorang (*over behavior*).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek. Pengetahuan tersebut meliputi hal mengetahui, memahami, menggunakan, dan mengevaluasi suatu objek. Sementara itu, regulasi kebahasaan merupakan serangkaian aturan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mengatur penggunaan bahasa di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, pengetahuan regulasi kebahasaan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kesadaran seseorang terhadap adanya aturan kebahasaan yang mengatur penggunaan bahasa. Adapun regulasi kebahasaan, antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945, Bab III Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

2. Sikap Bahasa

Definisi sikap berkaitan dengan bahasa yang selanjutnya disebut sikap bahasa dapat dibagi dua bagian menurut Pateda (1987:30), yaitu sikap terhadap bahasa dan sikap berbahasa. Sikap terhadap bahasa terletak pada tanggung jawab dan penghargaan terhadap bahasa, sedangkan sikap berbahasa terletak pada kesadaran diri dalam menggunakan bahasa secara tertib. Sikap terhadap bahasa, demikian halnya dengan sikap berbahasa, dapat menjadi positif, dapat pula menjadi negatif. Garvin dan Mathiot (dalam Mukhamdanah, 2005:15) merumuskan tiga ciri sikap positif terhadap bahasa, yaitu (1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*), yang mendorong seseorang untuk mempertahankan bahasanya; bila perlu mencegah adanya pengaruh dari bahasa lain; (2) kebanggaan bahasa (*language pride*), yang mendorong seseorang untuk mengembangkan bahasa dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan dalam masyarakat; (3) kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*), yang mendorong seseorang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun.

3. Penggunaan Bahasa

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan interaksi dan kegiatan sosial untuk mengenali keberadaan anggotamasyarakat (Dany Ardhian, 2018: 170--181). Di Negara Republik Indonesia telah ditetapkan

bahwa bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa adalah bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus di Bab XV, yaitu Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat yang sangat dominan sebagai media untuk menyampaikan ide atau informasi kepada mitra tutur. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan di ruang publik harus mengacu pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ruang publik dalam konteks ini adalah sarana komunikasi yang menggunakan alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau ruang yang dapat diakses oleh orang umum. Pengutamaan bahasa negara berarti mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan, atau menomorsatukan bahasa negara dibandingkan dengan bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud adalah bahasa daerah dan bahasa asing.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *ex-post facto*, yaitu meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian sebab-akibat dilakukan terhadap program, kegiatan, atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat didasarkan atas kajian teoretis, bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu.

Penelitian ini memiliki tiga variabel, dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan regulasi kebahasaan pimpinan lembaga (X_1) dan sikap bahasa

(X_2), serta penggunaan bahasa di ruang publik (Y). Variabel tersebut akan dijangar melalui persebaran kuesioner untuk variabel bebas dan observasi untuk variabel terikat.

Penelitian ini bertempat di Kota Samarindadengansasaran22lembagayang terdiri atas lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lembaga pemerintah Kota Samarinda, SMPN, MTsN, SMAN, dan MAN. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini digunakan dua macam kuesioner untuk menjangar data dari dua variable bebas, yaitu kuesioner untuk mengambil data pengetahuan regulasi kebahasaan dengan model skala Gutmann dan kuesioner sikap bahasa menggunakan model skala Likert.

Adapun instrumen penggunaan bahasa mengacu pada juknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam juknis ini ada 50 objek dari 7 ranah yang diamati dan dinilai penggunaan bahasanya, apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa dan regulasi kebahasaan. Penilaian dilakukan pada aspek fisik bahasa, kaidah bahasa, dan tipografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bagian hasil penelitian akan dijabarkan deskripsi data dan analisis inferensial data yang telah didapatkan. Deskripsi data yang disampaikan berupa

data dari masing-masing variabel, yaitu pengetahuan regulasi kebahasaan (X_1), sikap bahasa (X_2), dan penggunaan bahasa di ruang publik (Y). Analisis inferensial berisi (1) pemeriksaan asumsi, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linieritas, dan uji multikolinearitas; dan (2) uji hipotesis penelitian, yaitu uji parsial dan uji regresi linear berganda.

1) Deskripsi Data

Data kuesioner dan data penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda berasal 22 lembaga dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel X_1 merupakan nilai variabel pengetahuan regulasi kebahasaan, variabel X_2 merupakan nilai variabel sikap bahasa, dan variabel Y merupakan nilai penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah.

Tabel Data Variabel Bebas dan Terikat

No.	Nama Lembaga	X1	X2	Y
1	Disdik Prov. Kaltim	28	145	89
2	Dispar Prov. Kaltim	23	137	85
3	Diskominfo Kaltim	26	124	80,3
4	RSUD A.W.S.	31	138	87,2
5	Diskominfo Kota Smd	16	125	81
6	Dishub Prov. Kaltim	17	128	82
7	Setda Kota Smd	30	149	91
8	Disdik Kota Smd	20	122	81,1
9	MPP Kota Smd	27	119	84
10	Disporapar Kota Smd	23	148	86
11	SMAN 1	21	135	85
12	SMAN 5	24	146	87
13	SMAN 10	29	157	90,8
14	SMKN 1	21	148	86
15	MAN 1	25	137	86,5
16	MAN 2	28	139	85
17	SMPN 1	31	154	92,6
18	SMPN 2	23	130	86,2

19	SMPN 10	30	147	90
20	SMPN 22	27	144	84
21	MTSN	25	132	90,1
22	Setda Prov. Kaltim	24	132	85,5

Data variabel hasil penelitian ini akan dipaparkan satu per satu sebagai berikut.

(1) Pengetahuan Regulasi Kebahasaan

Berdasarkan hasil data variabel pengetahuan regulasi kebahasaan (X_1)

diketahui nilai maksimal responden sebesar 31 dan nilai minimal 16. Dari nilai maksimal dan minimal tersebut diperoleh nilai rata-rata 24,95. Nilai variabel ini diperoleh dari 10 pertanyaan. Gambaran mengenai statistik variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Deskriptif Data Variabel X_1

Pengetahuan Regulasi Kebahasaan (X_1)			
Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	0-16	1	5%
Rendah	17-20	2	9%
Cukup	21-24	7	32%
Tinggi	25-28	7	32%
Sangat Tinggi	29-32	5	23%
Total		22	100%

Pada tabel variabel pengetahuan regulasi kebahasaan (X_1) menampilkan 5 kategori dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Pada kolom sangat rendah terdapat 1 responden atau 5%, kolom rendah terdapat 2 responden atau 9%, kolom cukup terdapat 7 responden atau 32%, kolom tinggi terdapat 7 responden atau 32%, dan kolom sangat tinggi terdapat 5 responden atau 23%.

(2) Sikap Bahasa

Berdasarkan data hasil penelitian variabel sikap bahasa (X_2) diketahui nilai maksimal responden sebesar 157 dan nilai minimal 119. Dari nilai maksimal dan minimal tersebut diperoleh nilai rata-rata (tengah) 138. Nilai variabel ini diperoleh dari 32 pernyataan. Statistik variabel sikap bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Deskriptif Data Variabel X₂

Sikap Bahasa (X₂)			
Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	119-126	4	18%
Rendah	127-134	4	18%
Cukup	135-142	5	23%
Tinggi	143-150	7	32%
Sangat Tinggi	151-158	2	9%
Total		22	100%

Pada tabel variabel sikap bahasa (X₂) ditampilkan 5 kategori dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Di kategori sangat rendah terdapat 4 responden atau 18%, kategori rendah terdapat 4 responden atau 18%, kategori cukup terdapat 5 responden atau 23%, kategori tinggi terdapat 7 responden atau 32%, dan kategori sangat tinggi terdapat 2 responden atau 9%.

(3) Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Penggunaan bahasa di ruang publik dinilai dengan menggunakan acuan juknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara.

Dalam juknis ini ditetapkan ada 7 ranah penggunaan bahasa ruang publik dengan jumlah maksimal 50 objek penggunaan bahasa di setiap lembaga. Penilaian dilakukan pada 3 aspek, yaitu (1) aspek fisik kebahasaan dengan bobot 50% yang meliputi posisi, ukuran, dan warna huruf; (2) aspek kaidah kebahasaan dengan bobot 30% yang meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur; (3) aspek tipografi kebahasaan dengan bobot 20% yang meliputi kejelasan dan keterbacaan, komposisi, dan konteks. Statistik variabel penggunaan bahasa di ruang publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Deskriptif Data Variabel Y

Penggunaan Bahasa di Ruang Publik (Y)			
Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	0-20	0	0%
Rendah	21-40	0	0%
Cukup	41-60	0	0%
Tinggi	61-80	1	4%
Sangat Tinggi	81-100	21	96%
Total		22	100%

Berdasarkan data penelitian variabel penggunaan bahasa di ruang publik lembaga (Y) diketahui nilai maksimal responden/lembaga sebesar 92,6 dan nilai minimal 80,3. Dari nilai maksimal dan minimal tersebut diperoleh nilai rata-rata 86,15. Pada tabel di atas ditampilkan 5 pengelompokan kategori nilai dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Nilai penggunaan bahasa ruang publik lembaga pada kategori sangat rendah, rendah, dan cukup tidak ada, sedangkan nilai pada kategori tinggi terdapat 1 lembaga atau 4%, dan nilai pada kategori sangat tinggi terdapat 21 lembaga atau 96%.

(4) Analisis Inferensial

Analisis inferensial yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Uji regresi ini digunakan untuk mencari pengaruh antara pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa di ruang publik. Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi untuk mengetahui data yang digunakan apakah layak untuk diuji hipotesis penelitian. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linieritas, dan uji multikolinearitas.

(5) Uji Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model analisis model regresi linear berganda sebagai dasar pembuktian hipotesis. Analisis regresi merupakan alat statistik yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh prediktor (variabel bebas) terhadap kriteriumnya (variabel terikat). Prediktor dalam penelitian ini ada dua, yaitu pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa, sedangkan kriteriumnya ada satu, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik. Pengaruh dalam hasil penghitungan diwujudkan dari besarnya nilai pengaruh

dalam bentuk persentase (%). Besarnya persentase berkisar 0% sampai dengan 100%. Penghitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan memanfaatkan program SPSS Versi 22.

(a) Uji Keberartian Koeffisien Regresi (Uji T)

Untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat perlu dilakukan uji T. Pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Uji T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.699	5.583		9.618	.000
	Regulasi Kebahasaan	.318	.118	.397	2.682	.015
	Sikap Bahasa	.178	.047	.557	3.764	.001

a. Dependent Variable: Penggunaan Bahasa RP

Berdasarkan hasil uji T sebagaimana tampak pada tabel di atas diketahui variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara sendiri-sendiri dalam penelitian ini. Berikut penjabaran uji T atas setiap variabel.

(1) Variabel pengetahuan regulasi kebahasaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Hal ini diperoleh dari hasil penghitungan t_{hitung} bernilai $2,682 > t_{tabel}$, yakni $2,08596$ ($2,682 > 2,08596$), dengan nilai signifikan $0,015 < 0,050$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan regulasi

kebahasaan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda secara positif dan signifikan.

(2) Variabel sikap bahasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Hal ini diperoleh dari t_{hitung} bernilai $3,764 > t_{tabel}$ yang bernilai $2,08596$ ($3,764 > 2,08596$), dengan nilai signifikan $0,001 < 0,050$. Dengan demikian, hipotesis yang kedua diterima karena terdapat pengaruh sikap bahasa secara positif dan signifikan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda secara positif dan signifikan.

(b) Uji Keberartian Model Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-

sama atau simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut ini tabel hasil uji F pada data penelitian ini.

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.740	2	85.370	22.022	.000 ^b
	Residual	73.655	19	3.877		
	Total	244.395	21			

a. Dependent Variable: Penggunaan Bahasa RP

b. Predictors: (Constant), Sikap Bahasa, Regulasi Kebahasaan

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diketahui nilai sig. sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Artinya, variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga tersebut.

(c) Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R²)

Pengujian koefisien determinasi (R²) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa dapat memengaruhi penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Untuk melihat hasil pengujian koefisien determinasi *Adjusted Square* (R²) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.667	1.96890

a. Predictors: (Constant), Sikap Bahasa, Regulasi Kebahasaan

b. Dependent Variable: Penggunaan Bahasa RP

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebagaimana tampak pada tabel di atas diketahui model *summary* di atas menunjukkan nilai uji determinasi (*Adjusted R-Square*) sebesar 0,667 atau dibulatkan

67%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa dapat memengaruhi kemampuan penggunaan bahasa di ruang publik lembaga peme-

rintah di Kota Samarinda. Selebihnya adalah 33% atau 100% - 67% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Dari paparan hasil analisis data penelitian ini diketahui hasil uji hipotesis penelitian. Selain itu, dapat pula dilihat per-

samaan regresi untuk mengetahui pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa di ruang publik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	53.699	5.583			
Regulasi Kebahasaan	.318	.118	.397	.752	1.379
Sikap Bahasa	.178	.047	.557	.752	1.379

Dari hasil pengujian regresi linear berganda, terdapat persamaan yang menunjukkan bahwa koefisien regresi dari kedua variabel bebas bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa terpenuhi yang mengakibatkan nilai penggunaan bahasa meningkat. Sebaliknya, jika variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa tidak terpenuhi dapat mengakibatkan penurunan kemampuan penggunaan bahasa di ruang publik. Berikut penjelasan hasil pengujian yang telah dilakukan.

- a. Jika diasumsikan nilai koefisien variabel pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa mempunyai nilai nol, nilai variabel penggunaan bahasa di ruang publik sebesar 53,699. Hal ini ditunjukkan oleh nilai konstanta sebesar 53,699.
- b. Nilai koefisien variabel pengetahuan regulasi kebahasaan (X_1) sebesar 0,318 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan regulasi kebahasaan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan bahasa di

ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap ada kenaikan pengetahuan regulasi kebahasaan 1 satuan akan meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa sebesar 0,318.

- c. Nilai koefisien variabel sikap bahasa (X_2) sebesar 0,178. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sikap bahasa (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap ada kenaikan sikap bahasa 1 satuan akan meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa sebesar 0,178.

2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda terhadap penggunaan bahasa

di ruang publik. Pembahasan yang dapat dipaparkan dalam bagian ini adalah sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini paparan pembahasan hasil penelitian ini secara per variabel bebas.

(1) Pengaruh Pengetahuan Regulasi Kebahasaan Pimpinan Lembaga Pemerintah terhadap Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel pengetahuan regulasi kebahasaan pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda dan penggunaan bahasa di ruang publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian serupa tentang pengaruh pengetahuan peraturan kebahasaan terhadap sikap bahasa pengusaha kuliner di Kabupaten Pringsewu oleh Ratih dan Sustiyantini (Ratih dan Sustiyantini, 2017). Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh teori Yuniarsih dan Suwatno (2008) yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang, khususnya pada bidang spesifik. Selanjutnya, Notoatmodjo (2012) mengatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Dengan demikian, penggunaan bahasa di ruang publik sebagai hasil cipta seseorang atau suatu lembaga merupakan cerminan dari pengetahuannya terhadap regulasi kebahasaan yang ada. Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan regulasi kebahasaan pimpinan lembaga pemerintah di Kota Samarinda terhadap penggunaan bahasanya di ruang publik.

(2) Pengaruh Sikap Bahasa Pimpinan Lembaga Pemerintah terhadap Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel sikap bahasa dan penggunaan bahasa di ruang publik lembaga di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian *Sikap Bahasa Guru Sekolah Dasar terhadap Bahasa Indonesia Ragam Tulis Baku* pada tahun 2018 oleh Wijayanti, Darmoyo, S., dan Dhian di Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian *Sikap Bahasa di Kalangan Pengajar se-Kota Jayapura terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing* pada tahun 2014 oleh Sitti Mariati S. dari Balai Bahasa Provinsi Papua.

Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini menegaskan teori yang disampaikan oleh Chave, Bogardus, LaPiere, Mead, dan Gordon Allport yang menyatakan bahwa sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 2009). Selain itu, menurut Pateda (1987) sikap terhadap bahasa penekanannya tertuju pada tanggung jawab dan penghargaan terhadap bahasa, sedangkan sikap berbahasa ditekankan pada kesadaran diri dalam menggunakan bahasa secara tertib.

Melalui beberapa pendapat dan penelitian berkenaan dengan sikap bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik sikap bahasa yang dimiliki oleh seseorang, akan semakin baik pula penggunaan bahasanya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap bahasa pimpinan lembaga

pemerintah di Kota Samarinda dan penggunaan bahasa di ruang publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan regulasi kebahasaan dan sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa di ruang publik lembaga pemerintah di Kota Samarinda. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardhian, Dany & Soemarlani. (2018). Mengenal Kajian Lanskap Linguistik dan Upaya Penataannya Dalam Ruang-Ruang Publik di Indonesia. *Jurnal Akrab Juara* 3 (3): 170--181. Pekanbaru: Yayasan Akrab.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasuki, S. dkk. 2015. "Penelitian Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta". Laman publikasiilmiah.ums.ac.id tahun 2015. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/9>
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianita, Haryadi Sarjono, Winda. 2011. "Buku Metode Penelitian Survei." 1–209
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*.
- Mariati S, Sitti. 2014. Sikap Bahasa di Kalangan Pengajar se-Kota Jayapura terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing. *Jurnal Medan Bahasa* 7 (1). Surabaya: Kantor Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Mukhamdanah. 2005. "Pemertahanan dan Sikap Bahasa di Kalangan Mahasiswa Warga Negara Indonesia Keturunan Cina di Medan dalam Konteks Kedwibahasaan". Laporan Penelitian Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pateda, Mansoer. 1987. *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2022. *Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022-2024*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
- Pramudjono. 2010. *Statistika Dasar*. Samarinda: Puri Kencana Mandiri.
- Rahayu, Ratih dan Sustiyanti. 2017. Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Kebahasaan terhadap Sikap Bahasa Pengusaha Kuliner di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ranah* 6 (1). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University.
- Sugiyono. 2014. Sikap Bahasa Masyarakat Perkotaan di Kalimantan. *Jurnal Widyaparwa* 42 (2). Yogyakarta: Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, Basuki. 1996. *Sikap Bahasa: Suatu Telaah Eksploratif atas Sekelompok Sarjana dan Mahasiswa di Jakarta*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Wijayanti, Darmoyo, S., dan Dhian. 2018. Sikap Bahasa Guru Sekolah Dasar terhadap Bahasa Indonesia Ragam Tulis Baku. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 18 (1). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfadli, M. Andri. 2014. Penggunaan Bahasa pada Media Luar Ruang di Kabupaten Lampung Selatan dan Tengah. *Bunga Rampai Penelitian Bahasa dan Sastra Edisi 1*. Lampung: Kantor Bahasa Provinsi Lampung.